



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu disusun peta jalan pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa tingkat inflasi daerah yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi daerah maka diperlukan pengaturan tentang peta jalan pengendalian inflasi Daerah tahun 2025-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra

Tingkat I Maluku” (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2025-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
5. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 yang selanjutnya disebut Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian Daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Inflasi di Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah untuk:

- a. memastikan kesinambungan, sinkronisasi dan ketepatan program dalam rangka mengendalikan inflasi dengan karakteristik Daerah; dan
- b. mendorong Daerah untuk membuat inovasi.

BAB II

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka melaksanakan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 November 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR
39

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEBIE P. J. BUNGA, SH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2025-2027

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2025-2027

4K	PROGRAM	SUB PROGRAM KERJA			INDIKATOR	TARGET			PIC
						2025	2026	2027	
1	2			3	4	5	6	7	8
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1		Rewiew harga eceran tertinggi dan/atau harga acuan					
			a	Sosialisasi Peraturan Bupati tentang harga dan Peraturan Bupati tentang satuan Jual Bahan Pangan dan Komoditi Lokal	Jumlah pedagang/penjual/pengepul tersosialisasi	300 Pelaku usaha/konsumen	300 Pelaku usaha/konsumen	300 Pelaku usaha/konsumen	Dinas Perindagnaker
		2		Stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok, melalui :					Dinas Perindagnaker
			a.	Operasi Pasar	Jumlah pelaksanaan Operasi pasar saat hargai bergejolak	2 Kali	2 Kali	2 Kali	Dinas Perindagnaker
			b.	Pasar Murah dan Bazar	Jumlah pelaksanaan pasar murah dan bazar menjelang Besar Keagamaan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	Dinas Perindagnaker
			c.	Sidak pasar, monitoring pasokan & harga, serta gudang distributor	Kegiatan Sidak Pasar, monitoring pasokan dan harga serta gudang distributor akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	2 Kali	2 Kali	2 Kali	Dinas Perindagnaker
		3		Optimalisasi kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras	Kegiatan KPSH akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	2 Kali	2 Kali	2 Kali	BULOG
	Pengelolaan Perikanan/tangkap	1		Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	59 paket	59 paket	59 paket	Dinas perikanan
		2		Pelaksanaan Fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	unit usaha yang difasilitasi pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan	34 unit usaha	34 unit usaha	34 unit usaha	Dinas perikanan
		3		pelayanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	layanan pengujian ikan segar	2 layanan	2 layanan	2 layanan	Dinas perikanan
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1		Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu	tersedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	75 paket	75 paket	75 paket	Dinas perikanan
		2		Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	unit usaha yang difasilitasi pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan	50 unit usaha	50 unit usaha	50 unit usaha	Dinas perikanan

4K	PROGRAM	SUB PROGRAM KERJA		INDIKATOR	TARGET			PIC
					2025	2026	2027	
1	2		3	4	5	6	7	8
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	1	Pengembangan Ohoi Tanaman Pangan dan Hortikultura:					
		a	Bawang Merah	Ohoi Pengembangan Bawang Merah	6	8	10	Dinas Pertanian
		b	Aneka Cabai	Ohoi Pengembangan Aneka Cabai	14	16	18	Dinas Pertanian
		c	Aneka sayuran penyumbang inflasi	Ohoi Pengembangan Sayur	16	17	18	Dinas Pertanian
		2	Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian					
		a	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi	Luasan Lahan Pertanian Teririgasi	5 Ha	5 Ha	5 Ha	Dinas Pertanian
		b	Jalan Produksi pertanian/Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Produksi Pertanian	7 Km	8 Km	9 Km	Dinas Pertanian
		c	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Pertanian	RENAKSI Pengembangan Pertanian	1 dokumen	-	-	Dinas Pertanian
		3	Penerapan praktik budidaya sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP) dan Good Handling Practice (GHP)					Dinas Pertanian
		-	Peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha dengan GAP, GHP	POKTAN menerapkan GAP dan GHP	36 Poktan	41 poktan	46 poktan	Dinas Pertanian
		4	Peningkatan produksi protein hewani :					Dinas Pertanian
		-	Produksi Ayam Petelur	Peningkatan Produksi Telur Ayam	5%	5%	5%	Dinas Pertanian
		-	Produksi Daging Sapi	Peningkatan Produksi Daging Sapi	5%	5%	5%	Dinas Pertanian
		5	Produksi dan Peningkatan Pemasaran Minyak Goreng Lokal	Produksi Minyak Goreng	10.800 liter/tahun	14000 liter/tahun	14000 liter/tahun	Dinas Pertanian
	Produksi Domestik	1	Penyusunan Neraca Pangan /Minggu	Neraca Pangan Strategis	52 laporan	52 Laporan	52 laporan	Dinas Ketahanan Pangan
		2	Pola Pangan Harpan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan
		3	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH Konsumsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan
		4	Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Daerah(FSVA)/Food Security Vormobility Atlas	Peta FSVA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan
	Penguatan Cadangan Pangan	1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jenis Pangan Lokal Tersedia fokus ke ohoi rawan pangan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Dinas Ketahanan Pangan

4K	PROGRAM	SUB PROGRAM KERJA		INDIKATOR	TARGET			PIC
					2025	2026	2027	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi	Tersediannya Ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	0,5 Ton	0,5 Ton	0,5 Ton	Dinas Perikanan
		2	Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Pelaku usaha skala mikro dan kecil yang terfasilitasi	6 UPI (Unit Pengolahan Ikan)	6 UPI (Unit Pengolahan Ikan)	6 UPI (Unit Pengolahan Ikan)	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Perikanan Budidaya	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Prasarana Pembudidayaan ikan yang tersedia	34 Unit	34 Unit	34 Unit	Dinas Perikanan
		2	Penguatan Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pass kecil nelayan	Atributif	Atributif		
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah:					BULOG
		-	Beras (CBP)	Jumlah Beras CBP	ton/tahun	ton/tahun	ton/tahun	BULOG
	Penguatan Kelembagaan	1	Penguatan kelembagaan petani pangan & hortikultura, peternak, perikanan melalui:					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		-	Pembentukan kelompok petani (pangan, hortikultura)	POKTAN Baru	8 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 18 poktan dan 2 sayur)	9 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 18 poktan dan 5 sayur)	9 Cluster (Cabai 27 poktan, Bawang merah 20 poktan dan 10 sayur)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		-	Pembentukan kelompok peternak	POKNAK Baru	7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pembentukan kelompok Perikanan	KUB Baru	30	30	30	Dinas Perikanan
		2	Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	POKTAN Akses KUR	35 Petani	60 Petani	70 Petani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				KUB Akses KUR	3 KUB	5 KUB	5 KUB	Dinas Perikanan
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3	Pemanfaatan Skema Perbankan bagi UMKM	UMKM Akses KUR	30 UMKM	35 UMKM	40 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM

4K	PROGRAM	SUB PROGRAM KERJA			INDIKATOR	TARGET			PIC
						2025	2026	2027	
1	2		3		4	5	6	7	8
Kelancaran Distribusi	Penguatan KAD	1	Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD)		Jumlah KAD	1 KAD	1 KAD	1 KAD	Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan dan Bagian Perkonomian
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	1	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (tertinggal,terluar,terpencil, dan perbatasan)						
		-	Subsidi /bantuan mobil transportasi pangan		Jumlah Mobil Transportasi Desa	6Unit	6 Unit	6 Unit	Dinas Perhubungan
		-	Penambahan jalan mantap (jalan kondisi		Peningkatan Panjang Jalan Kondisi Mantap	10%	10%	10%	Dinas PUTR
		2	Partisipasi pada Pelaksanaan Event Pariwisata Dalam Negeri (Promosi destinasi Pariwisata, Desa Wisata, Produk-Produk Ekonomi Kreatif dan UMKM)		Jumlah Event Pariwisata	2 Event	2 Event	2 Event	Dinas Pariwisata, Dinas UMKM dan Koperasi
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	1	Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi		Sistem Informasi Panel Harga Pangan Strategis Terintegrasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Perindagnaker
		2	Pemantauan harga & stok Bapokting ditingkat agen dan pasar rakyat		Monitoring Stok dan harga barang kebutuhan , dilaksanakan 1kali dalam seminggu, sedangkan harga dilaporkan setiap hari kerja.	48 Kali/setiap hari kerja	48 Kali /setiap hari kerja	48 Kali /setiap hari kerja	Dinas Perindagnaker
	Koordinasi Pusat dan Daerah	1	Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi daerah		Peta Jalan TPID	Ada	Ada	Ada	Tim Penyusun
		2	Peningkatan kehandalan TPID melalui program pembinaan TPID/capacity building/sosialisasi						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan
		-	Pelatihan petani/nelayan dalam menyiasati over produksi		Petani terlatih	20 Petani	20 Petani	30 Petani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Nelayan Terlatih	30 Nelayan	30 Nelayan	50 Nelayan	Dinas Perikanan
		3	Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media sosial		Media Sosial yang Dimanfaatkan untuk Menyebarkan Informasi	4 Medsos	4 Medsos	4 Medsos	Dinas Perindagnaker, Dinas Koperasi dan UMKM
		4	a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi		Rapat Koordinasi Pusat dan Provinsi	4 kali	4 kali	4 kali	Setda Bagian Perekonomian dan SDA

4K	PROGRAM	SUB PROGRAM KERJA		INDIKATOR	TARGET			PIC
					2025	2026	2027	
1	2		3	4	5	6	7	8
			b. Rapat bersama Kemendagri	Rapat Koordinasi mingguan via Zoom	52 Kali	52 Kali	52 Kali	Setda Bagian Perekonomian dan SDA
			c. HLM dan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Maluku Tenggara	Rapat bersama anggota TPID Kabupaten Maluku Tenggara	10 Kali	10 Kali	10 Kali	Setda Bagian Perekonomian dan SDA
	Mengendalikan Ekspektasi	1	Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya	Bauran Kebijakan untuk Menjaga Ekspektasi Inflasi	1 Bauran Kebijakan	1 Bauran Kebijakan	1 Bauran Kebijakan	BI Perwakilan Maluku dan TPID Kab. Maluku Tenggara
	Koord+C70:M73inasi dan kolaborasi Dinas terkait tentang perkembangan harga barang kebutuhan pokok	1	Pemantauan harga setiap tri wulan	Jumah Pemantauan harga setiap triwulan	4 x	4 x	4 x	Disperindag , Diskominfo dan stakeholder terkait
	Komunikasi belanja bijak melalui media sosial dan online	2	Penyebaran himbauan melalui akun facebook dan flyer	jjumlah Penyebaran himbauan melalui akun facebook dan flyer	12 x	12 x	12 x	Disperindag dan Diskominfo
	Komunikasi Ketersediaan produk/barang	3	Penyebaran himbauan melalui akun facebook dan flyer	Jumlah Penyebaran himbauan melalui akun Facebook dan flyer	12 x	12 x	12 x	Disperindag dan Diskominfo
	Penyediaan data informasi harga dan stok barang	4	Pengadaan aplikasi harga dan stok barang	Jumlah Pengadaan aplikasi harga dan stok barang	1 aplikasi	-	-	Diskominfo
			Panduan Vitron Outdoor dan Indoor		1 Unit	-	1 Unit	Diskominfo
	Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Pendampingan, Pelatihan, Pembinaan, Bimbingan Teknis bagi Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Pemasar	Nelayan terlatih, Pembudidaya Terlatih, Pengolah dan Pemasar terlatih	1.000 Nelayan Pembudidaya dan Pengolah Pemasar	1.000 Nelayan Pembudidaya dan Pengolah Pemasar	1.000 Nelayan Pembudidaya dan Pengolah Pemasar	Dinas Perikanan

BUPATI MALUKU TENGGARA

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAKU HUKUM,
P. J. BUNGA, SH